



EDISI KAMIS 16 APRIL 2026

H A R I A N

LENTERA

Inspirasi Perubahan

TODAY

02

GOVERNMENTTODAY
Yakinkan Investor AS, Purbaya: Ekonomi RI di Jalur Tepat

04

NUSANTARA
Isu Pesawat AS Bebas Terbang di Indonesia Kemlu Akui Surat Kemhan: Harus Hormati RI

10

LISTSTYLE
Pilihan Bahan Hijab saat Cuaca Panas: Nyaman dan Tetap Stylish

PERTAMA DALAM 30 TAHUN, ISRAEL-LEBANON BERDIALOG

Pertama dalam 30 tahun, Israel dan Lebanon menggelar pembicaraan tingkat tinggi pada Selasa (14/4/2026) waktu setempat di Washington. Pertemuan bersejarah ini terjadi setelah lebih dari satu bulan perang berkecamuk antara militer Israel dan kelompok militan Hizbullah yang didukung Iran. Tampak di foto, seorang pria duduk di samping mobil hancur dan puing-puing tempat sebuah bangunan hancur akibat serangan udara Israel pada Rabu sebelumnya, di pusat Beirut, Lebanon. (ist.ap)

REAKTIVASI BPJS WARGA MISKIN, MASIH JAUH PANGGANG DARI API

Upaya pemerintah mereaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi warga miskin masih jauh dari harapan. Dari total 11 juta peserta yang dinonaktifkan, baru sekitar 2 juta yang kembali aktif. Kondisi ini memicu kritik keras DPR saat rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (15/4/2026). Para wakil rakyat menilai, hal tersebut masih 'jauh panggang dari api' tak sesuai dengan kesepakatan awal. Di lapangan persoalan kian rumit. Jutaan warga ternyata belum bisa mengakses layanan secara optimal, meskipun pemerintah mengklaim bahwa semua tetap dilayani. Tak hanya itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan ada lebih dari 140 juta penduduk yang masuk kategori layak PBI BPJS. Tetapi faktanya, hanya sekitar 96 juta yang dapat ditanggung oleh negara. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemkes) mengatakan pihaknya membayar PBI dari 96 juta warga, 47.000 di antaranya dinilai masih kurang tepat sasaran. Selegenje data makin nyata. BACA HAL 11...



DATA JUMLAH PESERTA DAN ANGGARAN PBI JK (APBN)

TAHUN 2026

■ 96,8 juta jiwa
■ Rp 48,7 triliun.

TAHUN 2024

■ 96,7 juta jiwa
■ Rp 46,1 triliun.

TAHUN 2020

■ 96,5 juta jiwa
■ Rp 48,77 triliun.

TAHUN 2015

■ 86,4 juta jiwa
■ Rp 19,88 triliun.

TAHUN 2025

■ 96,8 juta jiwa
■ Rp 48,78 triliun.

TAHUN 2023

■ 96,7 juta jiwa
■ Rp 46,1 triliun.

TAHUN 2019

■ 96,8 juta jiwa
■ Rp 35,78 triliun.

TAHUN 2014

■ 86,4 juta jiwa
■ Rp 19,93 triliun.

■ Jumlah Peserta
■ Anggaran/Realisasi

YAKINKAN INVESTOR AS, PURBAYA: EKONOMI RI DI JALUR TEPAT

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan optimisme terhadap fundamental ekonomi Indonesia di tengah tekanan global, usai melakukan rangkaian pertemuan dengan investor serta lembaga internasional di New York City dan Washington DC. Dalam forum tersebut, pemerintah memaparkan arah kebijakan fiskal yang dinilai tetap berada di jalur tepat, sekaligus mendapat respons positif dari investor, International Monetary Fund, hingga World Bank. Meski diakui, ada kehati-hatian akibat sentimen global dan 'noise' pasar terhadap isu fiskal nasional.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan serangkaian pertemuan dengan investor di New York dan Washington DC guna mempromosikan kondisi ekonomi Indonesia. Dalam forum tersebut, ia menegaskan, arah kebijakan fiskal pemerintah berada di jalur yang tepat dan mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional.

"Pada dasarnya kita jelaskan kondisi ekonomi dan strategi fiskal kita ke depan, jadi mereka yakin bahwa gerakan atau kebijakan fiskal kita sudah pada arah yang benar," ujar Purbaya dikutip Rabu (15/4/2026).

Dalam pertemuan itu, Purbaya memaparkan fundamental makroekonomi Indonesia serta langkah-langkah kebijakan yang diambil pemerintah ke depan. Ia



Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bertemu dengan investor di kota New York dan Washington DC, Amerika Serikat. (Dok Kemenkeu)

menyebut, minat investor Amerika Serikat terhadap Indonesia masih cukup tinggi, meski sempat muncul keraguan akibat isu fiskal yang beredar di pasar.

"Mereka berniat melakukan investasi di Indonesia. Jadi beberapa penjelasan diberikan ke mereka untuk memastikan keraguan mereka terhadap Indonesia bisa di clear-kan,"

PROYEKSI PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (2026)

(Berdasarkan laporan per April 2026)

- IMF (International Monetary Fund) (April 2026) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,0%
- Bank Dunia (World Bank) (April 2026) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7%
- ADB (Asian Development Bank) (April 2026) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,2%
- OECD (April 2026) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,8%
- Pemerintah Indonesia (April 2026) menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%



katanya.

Menurut Purbaya, kekhawatiran investor bukan berasal dari kondisi fundamental ekonomi Indonesia, melainkan lebih pada "noise" atau sentimen pasar yang belum tentu mencerminkan kondisi sebenarnya.

"Jadi mereka (investor) nggak ragu, cuma mereka dengar ada noise bahwa fiskal kita bermasalah, mereka memastikan bahwa itu tidak benar," ujarnya. Ia menambahkan, setelah mendapatkan penjelasan langsung, para investor dapat memahami bahwa kebijakan ekonomi Indonesia masih sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi yang kuat.

"Kita jelaskan kebijakan fundamental kita seperti apa dan karena mereka orang pintar, mereka bisa menerima dengan sepenuh hati apa yang kita jelaskan sudah sesuai dengan teori-teori ekonomi," tambahnya.

Ke depan, pemerintah akan fokus menjaga pertumbuhan ekonomi sesuai target yang telah ditetapkan dalam APBN. Purbaya menyebut capaian pertumbuhan sekitar 5,5 persen pada triwulan I dan berlanjut kuat di triwulan II menjadi kunci untuk meningkatkan kepercayaan investor global.

"Jadi kita fokus memastikan bahwa kebijakan kita benar, implementasinya kita sesuai dengan design yang kita buat," pungkasnya.

Menurutnya, respons dari investor dan lembaga internasional cenderung positif. Mereka menunjukkan ketertarikan tinggi untuk menggali lebih dalam fundamental ekonomi Indonesia, khususnya terkait kemampuan pemerintah menjaga keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan stabilitas fiskal.

S&P: Indonesia Paling Rentan di Asia Tenggara

LEMBAGA pemeringkat S&P Global Ratings menilai posisi Indonesia menjadi yang paling rentan di kawasan Asia Tenggara dalam hal peringkat kredit, seiring meningkatnya tekanan global, khususnya dari lonjakan harga energi dan keterbatasan ruang fiskal.

Dalam laporan terbarunya, S&P mengingatkan bahwa risiko terhadap sovereign rating--yang mencerminkan kemampuan negara dalam memenuhi kewajiban utang--berpotensi meningkat jika konflik di Timur Tengah berlangsung lebih lama.

Kondisi ini dinilai dapat berdampak luas pada negara-negara di kawasan, namun Indonesia disebut menghadapi risiko lebih besar dibanding negara lain karena bantalan fiskalnya relatif lebih terbatas.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies, Bhima Yudhistira, menilai peringatan tersebut perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi memengaruhi persepsi pasar terhadap utang Indonesia sekaligus meningkatkan beban bunga.

"Kemampuan APBN dalam menyerap kenaikan harga minyak ternyata ada batasnya, disaat bersamaan program nasional dengan anggaran besar masih terus berjalan," tutur Bhima kepada Kontan, Rabu (15/4/2026).

Menurut Bhima, meskipun pemerintah mendapatkan tambahan penerimaan dari lonjakan harga komoditas seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit, keuntungan tersebut belum cukup untuk menutup potensi pelebaran defisit anggaran tahun ini.

Ia memperkirakan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi melebar hingga sekitar 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meningkat dari target pemerintah yang sebelumnya berada di kisaran Rp 240,1 triliun atau setara 0,93 persen dari PDB.

"Saat terjadi defisit bisa melebar di atas 3% dan akhirnya kenaikan BBM dan LPG tidak bisa dicegah. Situasi ini harus diantisipasi karena dampak peringatan S&P ke stabilitas nilai tukar cukup besar," ungkapnya.

Lebih lanjut, Bhima menilai pemerintah perlu mengambil langkah penyesuaian untuk menjaga kesehatan fiskal, termasuk dengan merasionalisasi program-program yang membutuhkan anggaran besar.

Menurutnya, program prioritas seperti makan bergizi gratis (MBG) perlu dievaluasi agar tidak membebani keuangan negara secara berlebihan. Di sisi lain, pemerintah juga didorong untuk meningkatkan penerimaan negara melalui optimalisasi pajak, termasuk dari keuntungan tak terduga (windfall), serta menutup celah kebocoran penerimaan.

Dengan berbagai tekanan tersebut, peringatan dari S&P menjadi sinyal penting bagi pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara belanja negara, stabilitas fiskal, dan ketahanan ekonomi di tengah gejolak global.

International Monetary Fund memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di level 5 persen pada 2026. Angka ini sedikit lebih rendah dibandingkan perkiraan sebelumnya dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Januari 2026 yang mencapai 5,1 persen. (wid,rls,ktn/dya)

Mendadak Rapat Pembahasan Awal RUU Pemilu Ditunda

DPR RI mendadak menunda rapat pembahasan awal untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) hingga waktu yang belum ditentukan. Rapat tersebut direncanakan membahas pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah, hingga ambang batas parlemen dan ambang batas pencalonan presiden.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan berdasarkan jadwal, seharusnya Komisi II DPR RI menggelar rapat tersebut pada Selasa (14/4) untuk mendengarkan paparan dari Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR RI.

"Siang itu (seharusnya) ada internal rapat dengan BKD tapi tiba-tiba dibatalkan, ditunda, yang sampai sekarang kita belum tahu kenapa gitu," kata Doli di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Meski ditunda, dia pun mengaku sudah meminta kepada BKD terkait poin-poin yang rencananya akan dipaparkan. Menurut dia, poin-poin yang akan dipaparkan itu meliputi pengantar, analisis, poin-poin pemetaan untuk merespons putusan Mahkamah Konstitusi (MK) hingga beragam masukan-masukan dari masyarakat soal sistem pemilu.

"Jadi, belum sampai pada draf



Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat diwawancarai di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (15/4/2026). (ANTARA)

naskah akademik apalagi draf RUU-nya," kata dia.

Dia mengatakan pimpinan partai politik dan pimpinan DPR RI perlu segera menyikapi secara serius RUU Pemilu. Sebab, kata dia, semakin lama

pembahasannya ditunda, maka tahapan pemilu justru akan semakin dekat.

"Kalau kita lihat dari Undang-Undang yang sekarang, harusnya di bulan Agustus atau September ini,

pemerintah harus sudah membentuk timsel penyelenggara pemilu," kata dia.

Doli melanjutkan idealnya RUU Pemilu justru dibahas hanya selama dua atau tiga bulan saja, karena RUU itu adalah Undang-Undang yang besar dan sangat penting. Terlebih lagi, dia mengingatkan bahwa saat ini eranya sudah memasuki pembangunan reformasi tahap kedua.

"Kita harus menghindari pembahasan Undang-Undang yang terburu-buru, tergopoh-gopoh menjelang pemilu gitu. Artinya, nanti tidak objektif," kata dia.

Doli mengungkapkan, setidaknya ada 10 isu utama yang bakal dibahas apabila proses revisi UU Pemilu mulai dijalankan. "Kalau kita membahas undang-undang pemilu itu pasti mengemuka. Setidaknya ada 10 isu," kata Doli.

Ia menjelaskan, lima isu awal merupakan persoalan klasik yang kerap muncul dalam setiap pembahasan regulasi pemilu. Salah satunya terkait sistem pemilu, apakah tetap menggunakan sistem proporsional terbuka seperti saat ini atau kembali ke sistem proporsional tertutup.

Selain dua opsi tersebut, menurutnya, ada pula kemungkinan penerapan sistem campuran sebagai alternatif dalam pembahasan mendatang. "Yang kedua dan ketiga adalah tentang threshold, parliamentary threshold maupun presidential threshold," ujarnya.

Lebih lanjut, Doli menyebut isu klasik lainnya mencakup besaran kursi di setiap daerah pemilihan (district magnitude) serta metode konversi suara menjadi kursi di parlemen.

Di luar isu-isu tersebut, terdapat pula lima isu kontemporer yang akan menjadi fokus pembahasan. Salah satunya adalah penyesuaian aturan terkait keserentakan pemilu, menyusul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 yang mengatur pemisahan antara pemilu nasional dan lokal.

Selain itu, DPR juga akan mendorong peningkatan kualitas demokrasi, termasuk upaya menekan praktik politik uang dan jual beli suara. "Nah yang kedua tentang bagaimana membuat pemilu kita semakin hari harusnya semakin berwibawa, semakin bersih. Bagaimana kita mengurangi praktik-praktik money politics," katanya. (wid,ist,kum/dya)

Puskapol UI: Penundaan Revisi UU Pemilu Strategi Elite



di ruang publik.

"Menjadi strategi untuk mempertahankan kontrol demi menghindari debat di publik," kata dia dalam konferensi pers 'Segerakan Pembahasan Revisi UU Pemilu' di Kampus STH Jentara, Jakarta Timur, pekan lalu.

Menurut dia, elite politik khawatir isu revisi UU Pemilu menjadi perdebatan di ruang publik. Dia mencontohkan pengalaman ketika muncul isu Pilkada tidak langsung pada akhir 2025. Isu itu dianggap menguntungkan elite politik. Namun, isu itu kemudian ditarik ketika ada kritik dan perdebatan di ruang publik.

SEBELUMNYA, peneliti Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia (UI) Delia Wildianti sudah menyoroti molornya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) merupakan bagian strategi politik para elite. Strategi itu diduga untuk menghindari debat kepemiluan

di ruang publik. Dia mencontohkan pengalaman ketika muncul isu Pilkada tidak langsung pada akhir 2025. Isu itu dianggap menguntungkan elite politik. Namun, isu itu kemudian ditarik ketika ada kritik dan perdebatan di ruang publik.

Selain itu, dia melihat penundaan pembahasan revisi UU Pemilu untuk menghindari konflik elite di tengah rezim yang cenderung otoriter. Rezim otoriter cenderung mengutamakan stabilitas. Rezim itu menghindari perdebatan dan perpecahan antara elite politik. "Parlemen didominasi koalisi pemerintah. Ada satu suara dominan dari rezim. Ini menjadi tanda pilihan politik di balik penundaan revisi UU Pemilu," kata dia.

Dia juga melihat ada upaya untuk mengulur waktu sampai dekat dengan jadwal pemilu 2029. Padahal, semakin dekat waktu akan sulit melakukan perubahan aturan yang signifikan. "Pasti alasannya adalah 'udah dekat-dekat pemilu, masa mau ubah gitu ya, belum ada proses sosialisasinya panjang dan seterusnya'," ujar dia.

Bagi dia, situasi itu bisa diantisipasi dengan melakukan revisi sejak awal masa pemerintahan. Namun, dia melihat ada strategi politik untuk tidak mengubah sejumlah aturan. (wid,ist,kum/dya)

ISU PESAWAT AS BEBAS TERBANG DI INDONESIA

KEMLU AKUI SURATI KEMHAN: **HARUS HORMATI RI**

Kementerian Luar Negeri RI buka suara soal surat yang dilayangkan ke Kementerian Pertahanan RI berisikan terkait wacana pemberian izin terbang pesawat militer Amerika Serikat di wilayah Indonesia.

Dalam surat tersebut, Kemlu RI meminta Kemhan RI menunda kesepakatan final dengan Washington terkait pemberian izin terbang ini, menjelang pertemuan Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menhan AS Pete Hegseth di Washington, Senin (13/4/2026).

Juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan



Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang

komunikasi antarkementerian merupakan hal lazim dalam proses perumusan kebijakan. Ia juga menegaskan tidak ada kebijakan apa pun yang memberikan pihak asing akses bebas atas ruang udara Indonesia.

"Komunikasi antar kementerian

merupakan hal yang lazim dalam proses perumusan kebijakan," ucap Yvonne saat dikonfirmasi Rabu (15/4/2026).

Menurut Yvonne, setiap masukan dan pandangan antar kementerian/ lembaga merupakan bagian dari proses nasional yang wajar.

"Setiap usulan yang masih dalam pembahasan akan diproses secara cermat, terukur, dan sesuai mekanisme resmi pemerintah, sehingga tidak dapat dimaknai sebagai keputusan final maupun kebijakan yang telah berlaku," kata Yvonne menambahkan.

Dalam surat resmi yang didapat Reuters, Kemlu RI memperingatkan Kemhan RI bahwa memberikan izin "menyeluruh" (blanket) bagi militer AS untuk melintasi wilayah udara RI berisiko menyeret Jakarta ke dalam potensi konflik Laut China Selatan.

Surat dari Kemlu RI ini berstatus mendesak dan rahasia. Dokumen itu dikirim menjelang pertemuan Sjafrie dan Hegseth, di Washington, Senin pekan ini.

Dalam suratnya, Kemlu RI menegaskan proposal AS perlu disikapi dengan hati-hati karena memungkinkan Washington memaksimalkan operasi pengawasan dan pengintaian melalui wilayah Indonesia, serta berpotensi memengaruhi hubungan dengan mitra strategis lain di kawasan, termasuk China.

Kemlu RI bahkan mencatat dalam surat tersebut bahwa pesawat militer AS pernah 18 kali menggunakan wilayah udara Indonesia untuk mengintai dan memantau situasi di Laut China Selatan yang selama ini diklaim oleh Beijing.

Laut China Selatan memang menjadi titik panas konflik lantaran klaim sepihak China terhadap sebagian besar perairan kaya sumber daya alam itu tumpang tindih dengan teritorial negara lain terutama sejumlah negara di ASEAN.

Meski AS tak memiliki klaim wilayah di perairan itu, Washington kerap menjunjung tinggi hak kebebasan bernavigasi dan berlayar di Laut China Selatan.

Indonesia juga berulang kali tak memiliki sengketa klaim dengan China di Laut China Selatan. Namun, aktivitas kapal-kapal China yang sering menerobos masuk perairan Natuna dekat Laut China Selatan kerap membuat Jakarta kelimpungan juga.

Sementara itu, pemberian izin terbang pesawat AS ini juga dinilai dapat menimbulkan kesan bahwa Indonesia terlibat dalam aliansi tertentu. Ini bisa berimplikasi pada risiko keamanan nasional yang meningkat karena menempatkan Indonesia sebagai target potensial dalam konflik regional. (wid ant,ist/dya)

NEGARA YANG MENOLAK AKSES

Spanyol

- Menutup wilayah udara untuk pesawat militer AS.
- Melarang penggunaan pangkalan Rota & Moron.
- Quote: "Hal ini telah dijelaskan dengan sangat jelas kepada militer dan pasukan Amerika sejak awal".

Italia

- Menolak izin pendaratan di pangkalan utama di Sisilia

Perancis

- Menolak pesawat pembawa pasokan militer melintas wilayah udara



JAKARTA — Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) sekaligus Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Buya Anwar Abbas, menegaskan bahwa Indonesia seharusnya tidak memberikan izin bagi pesawat tempur Amerika Serikat (AS) untuk melintasi wilayah udaranya dalam konflik dengan Iran.

Ia menilai, pemberian izin tersebut sama saja dengan ikut mendukung tindakan agresi militer dan bentuk penjajahan yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan yang selama ini dijunjung Indonesia.

Menurut Buya Anwar, jika konflik antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut, maka jumlah korban jiwa maupun luka dipastikan akan meningkat. Karena itu, perang perlu dicegah dan segera dihentikan.

"Bila Amerika Serikat tetap bersikeras untuk melanjutkannya maka dunia termasuk Indonesia

'Sama Saja Indonesia Dukung Serang Iran'

harus bersikap keras dan tegas dalam menghadapinya," kata Buya Anwar.

Pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan tersebut juga mengingatkan agar Indonesia tidak memberi ruang bagi Amerika Serikat untuk bertindak sewenang-wenang. Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai perikemanusiaan dan keadilan.

Ia berpandangan, tindakan Amerika Serikat bersama Israel terhadap Iran telah melanggar nilai-nilai tersebut. Oleh sebab itu, jika ada permintaan izin bagi pesawat tempur AS untuk melintasi wilayah udara Indonesia, hal tersebut seharusnya ditolak.

"Karena jika Indonesia memberi izin maka itu sama saja artinya Indonesia telah mendukung Amerika untuk menyerang dan menghancurkan serta membunuh dan melukai rakyat Iran dan itu jelas tidak sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai luhur yang kita miliki," ujar Buya Anwar.

Lebih lanjut, Buya Anwar

meminta Presiden Prabowo dan DPR RI untuk berani mengambil sikap tegas dengan menolak rencana tersebut. Ia juga mengingatkan agar para pemimpin tidak gentar terhadap tekanan dari pihak mana pun.

"Jangan takut kepada Donald Trump tapi takutlah kepada Tuhan dan kepada rakyat yang akan murka."

Senafs, Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) Dino Patti Djalal mengingatkan pemerintah hati-hati dalam kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat (AS).

Dino Patti Djalal mengatakan kerja sama, termasuk mengenai kontrol lintas wilayah udara masih dalam draf alias belum diputuskan.

"Intinya itu hati-hati. Jangan sampai ada kesan kita langsung menyetujui segala sesuatu yang diminta Amerika," katanya dikutip dari Antara, Rabu (15/4/2026).

Dia menyampaikan pemerintah supaya tidak mengambil kebijakan appeasement, yakni pemberian kelonggaran kepada negara yang agresif. (wid ant,ist/dya)

SOAL PERCEPATAN ANTREAN HAJI KEMENAG GANTI ISTILAH: 'WAR TICKET' JADI 'FASTABIQUL TAZKIRAH'

Kementerian Haji dan Umrah memberikan penjelasan terkait polemik wacana 'war tiket haji'. Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, tujuan dari wacana ini mengurangi jumlah antrean. Namun kini istilahnya diubah menjadi Bahasa Arab yaitu 'Fastabiqul Tazkirah'.

Total ada 5,7 juta jemaah haji antre. Gus Irfan menyebut, wacana ini masih dalam tahap kajian dan membutuhkan pembahasan bersama. Ia memastikan tidak ada rencana penghapusan antrean bagi jemaah yang sudah menunggu lama.

"Jangan khawatir, tidak ada penghapusan antrean. Ini masih wacana panjang dan kita justru mencari solusi untuk mempercepat,"

5 PROVINSI DENGAN KUOTA TERBANYAK

(Juta Rupiah)

Jawa Timur

42.409

Jawa Tengah

34.112

Jawa Barat

29.643

Sulawesi Selatan

9670

Banten

9124



MENTERI Imigrasi dan Pemasarakatan (Imipas) RI, Agus Andrianto, menyampaikan bahwa layanan fast track Makkah Route untuk penyelenggaraan haji 2026 kini diperluas.

Melalui layanan ini, jemaah dapat menyelesaikan proses pemeriksaan dokumen dan stempel paspor sejak di Indonesia, sehingga saat tiba di Jeddah atau Madinah tidak perlu lagi mengantre di imigrasi.

Agus menjelaskan, sebelumnya layanan Makkah Route hanya tersedia di tiga bandara, yakni Soekarno-Hatta, Solo, dan Jawa Timur. Kini, fasilitas

Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf (kiri) bersama Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan RI Agus Andrianto dalam jumpa pers di Kantor Kemenhaj, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026). (ist)



ujar Gus Irfan dalam jumpa pers di Kantor Kemenhaj, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Sementara Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan percepatan antrean menjadi prioritas pemerintah sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Prinsip pertamanya sekarang antrean haji kita itu 5,7 juta orang. Nah, sekarang kami sedang berpikir bagaimana 5,7 juta ini bisa segera berangkat," kata Dahnil.

Menurutnya, masa tunggu haji yang sebelumnya mencapai hingga 49 tahun kini telah ditekan menjadi

Kini Ada 4 Bandara Layanani Makkah Route

tersebut juga hadir di Makassar.

"Kami juga melaporkan kepada Pak Menteri (Haji RI Irfan Yusuf), kami menambah Makkah Route yang kemarin hanya di tiga bandara, Soetta, Solo, dan Jawa Timur, kini ditambah di Makassar," kata Agus usai bertemu Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, di Kantor Kemenhaj, Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Ia berharap penambahan layanan ini dapat mendukung kelancaran keberangkatan jemaah haji Indonesia yang mulai diberangkatkan sejak April. Agus juga memperkirakan tingkat penggunaan layanan ini bisa melampaui 65 persen.

"Penggunaannya mungkin lebih dari 65 persen dan pada saat berangkat mudah-mudahan lancar," ujarnya.

Mengacu pada pelaksanaan tahun sebelumnya, hampir 60 persen jemaah telah memanfaatkan fasilitas tersebut. Agus menilai, Makkah Route memberi

kemudahan signifikan karena proses imigrasi sudah dituntaskan sebelum keberangkatan.

"Nanti mereka melalui proses yang lebih mudah, lewat saja, lewat koridor, itu sudah nanti mereka langsung bisa meninggalkan karena proses pemeriksaan imigrasi," jelasnya.

Sementara itu, Menteri Haji dan Umrah, Gus Irfan, menegaskan bahwa Makkah Route merupakan layanan pemeriksaan imigrasi Arab Saudi yang dilakukan di Indonesia sebelum keberangkatan.

Dengan mekanisme ini, jemaah yang tiba di Arab Saudi tidak lagi menjalani pemeriksaan imigrasi dan bisa langsung menuju bus untuk diantar ke penginapan.

"Makkah Route itu pemeriksaan imigrasi di Saudi dilaksanakan di sini, sehingga jemaah sampai di sana sudah tidak ada pemeriksaan lagi, langsung ke bus menuju penginapan," kata Irfan. (wid,ist,kum/dya)

sekitar 26 tahun. Namun, pemerintah masih mencari cara agar waktu tunggu tersebut bisa dipersingkat lagi.

Salah satu wacana yang muncul adalah konsep "war ticket" yang kemudian diistilahkan dengan pendekatan lebih bernuansa Arab, yakni "Fastabiqul Tazkirah".

Dahnil menjelaskan, istilah tersebut bukan sekadar gimmick, melainkan menggambarkan skema kompetisi terbuka bagi jemaah yang sudah memenuhi syarat (istita'ah) untuk bisa berangkat lebih cepat.

"Fastabiqul Tazkirah itu istilah saja. Intinya ada kompetisi, siapa yang mampu. Tapi jangan khawatir, prioritasnya tetap bagaimana mengurangi antrean 5,7 juta itu," ujarnya.

Secara bahasa, Fastabiqul Tazkirah dapat diartikan sebagai "berlomba-lomba dalam peringatan" atau "bersegera dalam memberikan peringatan/edukasi".

Ia menegaskan, skema tersebut tidak akan menghapus hak jemaah yang sudah lama mengantre.

Di sisi lain, pemerintah melihat peluang dari kebijakan jangka panjang Arab Saudi melalui program Saudi Vision 2030. Dalam visi tersebut, Arab Saudi menargetkan mampu menampung hingga sekitar 5 juta jemaah haji per tahun pada 2029-2030.

Jika target itu tercapai, Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan kuota haji yang signifikan.

"Kalau sekarang kuota kita sekitar 200 ribu lebih, ke depan bisa naik sampai 500-600 ribu. Itu bisa mempercepat antrean dari 26 tahun jadi sekitar 10 sampai 13 tahun," jelas Dahnil. Dengan peningkatan kuota tersebut, percepatan antrean dinilai lebih realistis tanpa mengubah sistem yang sudah berjalan.

Namun demikian, ia mengingatkan peningkatan kuota juga harus diimbangi dengan penguatan tata kelola keuangan haji.

Pemerintah saat ini, kata Dahnil, tengah mendorong reformasi pengelolaan dana haji melalui revisi undang-undang agar manfaatnya lebih optimal bagi jemaah.

Kementerian Haji dan Umrah menyusun Satuan Tugas (Satgas) Haji bersama Polri untuk mengantisipasi berbagai persoalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Termasuk praktik keberangkatan jemaah tanpa visa haji. Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan pembentukan Satgas Haji ini akan melibatkan sejumlah pihak, termasuk Kepolisian dan jajaran imigrasi.

Langkah ini diambil sebagai respons atas temuan tahun sebelumnya, di mana masih ada warga negara Indonesia yang berangkat ke Arab Saudi tanpa menggunakan visa haji resmi. (wid,ist,kum,ant/dya)

Kemarau 2026, BPBD Kabupaten Malang Petakan 6 Dusun Rawan Kekeringan



Arsip-Pendistribusian air bersih di salah satu wilayah terdampak kekeringan musim kemarau 2024 di Kabupaten Malang. (foto: PUSDALOPS BPBD Kab. Malang)

MALANG - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Malang memetakan sedikitnya 6 dusun rawan potensi kekeringan pada musim kemarau 2026. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi krisis air bersih saat puncak

Di antaranya, yakni Dusun Krajan dan Dusun Semampir di Desa Ringinsari, Kecamatan Sumbermanjing Wetan (Sumawe).

Kemudian Dusun Bandarangin di Desa Sumberejo, Kecamatan Pagak, serta Dusun Sumberkotes Kulon di

kemarau.

"Untuk antisipasi kekeringan kami sudah mempersiapkan semuanya, sembari terus memantau perkembangan cuaca di wilayah Kabupaten Malang," ujar Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Malang, Sadono Irawan, Rabu (15/4/2026).

Berdasarkan data BPBD Kabupaten Malang, sebanyak 6 dusun yang masuk dalam pemetaan rawan kekeringan tersebar di beberapa kecamatan.

Desa Segaran dan Dusun Pohkecek di Desa Tumpakrejo, Kecamatan Gedangan.

Selain itu, Dusun Sumbermaron di Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare juga masuk dalam daftar wilayah yang berpotensi mengalami keterbatasan pasokan air saat musim kemarau.

Meski telah dipetakan sebagai wilayah rawan, Sadono memastikan kondisi ketersediaan air di Malang Raya saat ini masih dalam kategori aman. Hal itu berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan desa.

Namun, pihaknya tetap meminta seluruh jajaran di tingkat wilayah untuk meningkatkan kewaspadaan. Apabila ditemukan indikasi penurunan ketersediaan air, laporan diminta segera disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Malang.

Laporan tersebut juga ditembuskan kepada instansi terkait, seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) serta Perumda Tirta, guna

mempercepat proses penanganan.

"Laporan resmi akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menetapkan status tanggap darurat, selain dari hasil asesmen dan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG)," jelasnya.

Apabila status tanggap darurat ditetapkan, BPBD akan segera mendistribusikan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan.

Lebih lanjut, Sadono mengungkapkan BPBD telah mengklasifikasikan kekeringan ke dalam 3 kategori, yakni kering kritis, kering langka, dan kering langka terbatas. Kategori ini digunakan sebagai dasar penentuan prioritas penanganan di lapangan.

Kering kritis ditetapkan untuk wilayah dengan jarak lebih dari tiga kilometer dari sumber air terdekat. "Sementara kering langka berada pada rentang 0,5 hingga 3 kilometer, dan kering langka terbatas pada jarak 0,1 hingga 0,5 kilometer dari sumber air," katanya. (Santi/Dya)

Pemkot Malang Ajukan 4 Ranperda: Penanganan Narkoba hingga Ruang Terbuka Hijau

MALANG- Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengajukan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) untuk memperkuat regulasi di berbagai sektor penting. Mulai dari penanganan peredaran narkoba hingga pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).

"Hari ini kami melakukan penyampaian terkait empat Ranperda. Sebenarnya ini sudah kami usulkan sejak 2023, ada yang 2024, dan ada

yang 2025. Namun karena kesempatan untuk menindaklanjuti baru ada sekarang, maka baru bisa kami bahas di tahun 2025 ini," ujar Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Rabu (15/4/2026).

Empat Ranperda yang dimaksud meliputi Ranperda tentang pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba, Ranperda Ruang Terbuka Hijau (RTH), Ranperda Penanaman Modal, serta Ranperda Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Seluruhnya dinilai memiliki urgensi tinggi dalam mendukung tata kelola kota yang lebih baik.

Ranperda terkait narkoba menjadi salah satu prioritas utama. Menurut Wahyu, hal ini tidak lepas dari risiko meningkatnya kerawanan peredaran narkotika di Kota Malang.

"Ini cukup mendesak karena tingkat kerawanan narkoba juga meningkat berdasarkan laporan dari Polresta. Maka pemerintah daerah perlu membuat dasar hukum yang kuat untuk langkah pencegahan peredaran narkoba," tegas Wahyu.

Selain itu, Pemkot Malang juga mendorong penguatan Ranperda RTH

sebagai tindak lanjut dari rencana tata ruang wilayah yang telah ada. Regulasi ini diharapkan mampu menjaga keberadaan ruang terbuka hijau di tengah tekanan pembangunan kota yang semakin pesat.

Menurut Wahyu, kondisi Kota Malang yang kian terasa panas menjadi salah satu alasan pentingnya perlindungan RTH.

"Kami ingin mengamankan RTH agar pemanfaatannya bisa dinikmati masyarakat dan sesuai harapan kita semua. Jangan sampai ada perubahan fungsi yang tidak sesuai," terangnya.

Meski demikian, Pemkot Malang belum berencana melakukan penambahan RTH secara besar-besaran. Fokus utama saat ini adalah memastikan pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang sudah ada berjalan optimal. "Kalau penambahan secara masif mungkin tidak. Fokus kami adalah meng-amankan dan mengelola



Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan penjelasan pengajuan 4 rancangan peraturan daerah (Ranperda) dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (15/4/2026). (Santi/Lentera)

yang sudah ada agar manfaatnya maksimal bagi masyarakat," imbuhnya.

Wahyu mencontohkan, kondisi RTH di kawasan selatan GOR Ken Arok, Kecamatan Kedungkandang mulai dimanfaatkan oleh Pedagang Kaki Lima (PKL). Dengan adanya Perda nantinya, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk melakukan penertiban jika terjadi penyimpangan fungsi. (Santi/Dya)

4 RANPERDA DIAJUKAN PEMKOT MALANG

- **Ranperda Narkoba:** fokus pencegahan dan pemberantasan peredaran.
- **Ranperda RTH:** menjaga fungsi ruang hijau di tengah tekanan pembangunan.
- **Ranperda Penanaman Modal:** sinkronisasi dengan UU Cipta Kerja untuk dorong investasi.
- **Ranperda Lalu Lintas:** atasi kemacetan lewat sistem transportasi terintegrasi.

WARNING!

KAPASITAS SENJATA NUKLIR KORUT **NAIK TAJAM**

Badan International Atomic Energy Agency (IAEA) mengungkap temuan terbaru yang mengkhawatirkan terkait perkembangan program nuklir Korea Utara. Kepala IAEA, Rafael Grossi, menyebut kapasitas negara tersebut dalam memproduksi senjata nuklir naik tajam. Bahkan, terdeteksi pembangunan fasilitas baru yang memiliki kemiripan dengan pabrik pengayaan di Yongbyon.

Dalam kunjungannya ke Seoul pada Rabu (15/4/2026), Grossi menjelaskan bahwa hasil pemantauan rutin menunjukkan adanya percepatan aktivitas di kompleks nuklir Yongbyon. Fasilitas yang sebelumnya diklaim tidak aktif itu, kini diketahui kembali beroperasi sejak 2021.

"Kami mengamati adanya lonjakan operasi pada unit pemrosesan ulang



Kim Jong Un mengawasi langsung uji coba rudal jelajah strategis dan rudal antikapal yang diluncurkan dari kapal perang Korut. Uji coba itu berlangsung Minggu (12/4/2026) di tengah rentetan peluncuran rudal terbaru oleh Pyongyang. (rtr/kcna)

dan reaktor air ringan di Yongbyon, serta pengaktifan fasilitas pendukung lainnya," ujar Grossi, dikutip dari AFP.

IAEA juga menilai Korea Utara terus mengembangkan kemampuan pengayaan uranium, tahap penting

dalam produksi hulu ledak nuklir. Bahkan, terdeteksi pembangunan fasilitas baru yang memiliki kemiripan dengan pabrik pengayaan di Yongbyon.

"Berdasarkan fitur eksternal

bangunan tersebut, kami memperkirakan akan ada peningkatan signifikan pada kapasitas pengayaan nuklir Korea Utara. Saat ini, kemampuan mereka diperkirakan telah mencapai puluhan hulu ledak," tambahnya.

Pengawasan terhadap aktivitas nuklir Korea Utara sendiri masih sangat terbatas. Sejak mengusir inspektur IAEA pada 2009, negara tersebut semakin tertutup sehingga menyulitkan verifikasi langsung terhadap jumlah produksi senjata nuklirnya.

Di tengah situasi itu, kerja sama militer antara Korea Utara dan Rusia juga menjadi perhatian. Namun, IAEA menyatakan belum menemukan bukti konkret adanya keterlibatan langsung Rusia dalam pengembangan teknologi nuklir Pyongyang.

Hingga kini, Korea Utara tetap berada di bawah sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait program senjata nuklirnya, dan berulang kali menegaskan tidak akan melepaskan arsenal tersebut.

Kompleks Yongbyon sendiri telah lama menjadi pusat perhatian dunia. Fasilitas ini mencakup reaktor berkapasitas 5 megawatt (MW) yang mampu menghasilkan plutonium tingkat senjata, serta instalasi pengayaan uranium yang canggih.

Sejarah Yongbyon juga mencerminkan dinamika diplomasi yang naik turun. Pada 2008, Korea Utara sempat merobohkan menara pendingin reaktor sebagai simbol komitmen denuklirisasi dalam perundingan enam negara. Namun, kegagalan diplomasi dan berlanjutnya sanksi membuat aktivitas di fasilitas tersebut kembali dihidupkan..(tin,kcna,ist,afp/dya)

NEGARA DENGAN HULU LEDAK NUKLIR TERBANYAK (2025)



Tegang dengan Jepang: Serukan Denuklirisasi Pyongyang

tahunan Kementerian Luar Negeri Jepang yang menegaskan kembali posisi negaranya dalam menentang kepemilikan senjata nuklir oleh Korea Utara. Pyongyang menilai pernyataan tersebut tidak hanya bersifat politis, tetapi juga mengganggu kepentingan strategisnya.

"Posisi tersebut merupakan provokasi serius yang melanggar hak kedaulatan, kepentingan keamanan, dan hak pembangunan negara suci kami," ujar pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita KCNA.

Pemerintah Korea Utara menegaskan bahwa pengembangan kekuatan pertahanan, termasuk senjata nuklir, merupakan hak mutlak untuk menjaga keamanan negara. Bahkan, mereka menyebut logika yang digunakan dalam dokumen diplomatik Jepang sebagai sesuatu yang tidak masuk akal.

Hingga kini, Pyongyang tetap berpegang pada sikapnya untuk tidak melepaskan persenjataan nuklir. Mereka juga menegaskan bahwa jalur penguatan militer yang ditempuh saat ini bersifat permanen dan tidak dapat diubah.

Selain isu nuklir, dokumen Jepang turut menyoroti kekhawatiran terkait dugaan pengiriman amunisi dan pasukan Korea Utara ke Rusia, yang disebut-sebut berkaitan dengan konflik di Ukraina.

Dalam laporan yang sama, Jepang juga menyesuaikan penilaian diplomatiknya terhadap China. Untuk pertama kalinya dalam satu dekade, Tokyo tidak lagi menyebut Beijing sebagai mitra terpenting, melainkan hanya sebagai tetangga penting.

Ketegangan antara Jepang dan China sendiri meningkat dalam beberapa bulan terakhir, terutama setelah pernyataan Perdana Menteri Jepang terkait kemungkinan intervensi militer jika terjadi konflik di Taiwan. Sementara itu, China tetap menegaskan bahwa Taiwan merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya. (ist,kcna/dya)

PEMERINTAH Korea Utara melontarkan protes keras terhadap Jepang setelah Tokyo merilis dokumen diplomatik tahunan yang kembali menegaskan penolakan terhadap program senjata nuklir Pyongyang. Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk provokasi yang menysar kedaulatan negara.

Kecaman ini muncul sebagai respons atas publikasi buku biru



Lampu Kuning IDAI: Risiko Kanker Kulit di Balik Tradisi Jemur Bayi

Tradisi menjemur bayi di bawah sinar matahari pagi seolah sudah menjadi hukum tak tertulis bagi para orang tua di Indonesia. Keyakinan bahwa paparan surya adalah kunci pembentukan vitamin D demi tulang yang kuat telah

diwariskan lintas generasi.

Namun, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) kini memberikan catatan kritis, praktik menjemur bayi baru lahir secara langsung justru menyimpan risiko yang lebih besar daripada manfaatnya.

Menurut penjelasan resmi IDAI, efektivitas sinar matahari dalam membantu sintesis vitamin D pada bayi sangat bergantung pada banyak variabel yang sulit dikontrol orang tua secara mandiri.

Faktor-faktor seperti waktu berjemur, durasi, kondisi cuaca, hingga luas permukaan kulit yang terpapar sangat menentukan hasilnya. Bahkan, warna kulit dan lokasi geografis pun turut berpengaruh. Ketidakpastian inilah yang membuat praktik jemur bayi sering kali tidak efektif mencapai target kecukupan vitamin D.

Lebih dari sekadar persoalan efektivitas, aspek keamanan kulit menjadi perhatian utama. Kulit bayi baru lahir memiliki struktur yang sangat tipis dan sensitif.

Paparan sinar ultraviolet (UV) yang berlebihan di usia dini dapat merusak jaringan kulit dan secara signifikan meningkatkan risiko kanker kulit di masa depan. Oleh karena itu, IDAI merekomendasikan agar bayi di bawah usia enam bulan tidak terpapar sinar matahari secara langsung.

Sebagai langkah preventif, perlindungan fisik menjadi garda terdepan. Orang tua disarankan memakaikan baju lengan panjang dan topi saat bayi berada di luar ruangan. Penggunaan tabir surya atau

sunscreen juga mulai diperhitungkan dengan syarat ketat. Untuk bayi di bawah enam bulan, sunscreen hanya boleh digunakan pada area kecil seperti wajah jika benar-benar diperlukan.

Sementara untuk bayi di atas enam bulan, penggunaan sunscreen dengan SPF 15 hingga 50 yang mengandung titanium dioxide atau zinc oxide lebih dianjurkan karena cenderung aman bagi kulit sensitif.

Lantas, bagaimana dengan kebutuhan vitamin D yang esensial bagi tumbuh kembang? IDAI menegaskan bahwa asupan vitamin D sebaiknya tidak lagi digantungkan pada aktivitas berjemur. Suplementasi rutin menjadi solusi yang lebih terukur dan aman.

Bayi berusia di bawah 12 bulan direkomendasikan mendapat asupan vitamin D sebanyak 400 IU per hari, sementara anak di atas satu tahun membutuhkan 600 IU per hari.

Anjuran ini tetap berlaku bagi bayi yang mengonsumsi ASI eksklusif, mengingat kandungan vitamin D dalam air susu ibu sering kali belum mencukupi kebutuhan harian tanpa bantuan suplemen tambahan.

Jika Bayi Kuning

Perawatan bayi kuning tidak dilakukan dengan cara menjemur di bawah sinar matahari, melainkan melalui pemeriksaan medis yang tepat. Dokter akan melakukan penilaian terhadap kadar bilirubin dalam tubuh bayi untuk menentukan tingkat keparahan kondisi tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, dokter kemudian menentukan penanganan yang paling sesuai, seperti melakukan observasi secara berkala terhadap kondisi bayi, memastikan bayi mendapatkan asupan ASI yang cukup untuk membantu proses pembuangan bilirubin, atau memberikan fototerapi (terapi dengan cahaya khusus di rumah sakit) apabila kadar bilirubin tergolong tinggi dan memerlukan penanganan lebih lanjut.

Oleh karena itu, sangat dianjurkan bagi orang tua untuk tidak melakukan penanganan sendiri tanpa arahan medis. Sebaiknya konsultasikan kondisi kesehatan bayi kepada tenaga medis profesional, terutama jika bayi tampak menguning pada kulit atau bagian mata, agar dapat memperoleh diagnosis yang akurat serta penanganan yang tepat, aman, dan sesuai dengan kebutuhan bayi. (Natasya- Mahasiswa UINSA berkontribusi dalam tulisan ini)

Panduan Praktis Memenuhi Kebutuhan Vitamin D Bayi

1. Suplementasi: Sumber Utama

ASI terbaik, tetapi vitamin D sering kurang. Berikan suplemen 400 IU/hari (bayi <12 bulan) sesuai anjuran IDAI. Gunakan bentuk tetes agar praktis, bisa diteteskan ke pipi dalam atau dicampur ASI/formula.

2. Aktivitas Luar Ruangan: Pendukung

Cukup 10–15 menit sebelum pukul 09.00. Gunakan pelindung seperti topi atau pakaian tertutup, hindari paparan langsung, dan perhatikan indeks UV (hindari jika >3).

3. Keamanan Kulit & Sunscreen

- Bayi <6 bulan: hindari sunscreen, fokus pada perlindungan fisik.
- Bayi >6 bulan: gunakan sunscreen khusus bayi SPF 15–50, pilih yang aman untuk kulit sensitif.

4. Nutrisi Tambahan (MPASI)

Mulai usia 6 bulan, berikan makanan kaya vitamin D seperti kuning telur, ikan (salmon, tuna, mackerel), serta produk fortifikasi.



Tas Tangan Kulit 'Dinosaurus' Bikin Heboh Dunia Sains

Sebuah tas tangan unik yang diklaim terbuat dari kolagen hasil ekstraksi fosil Tyrannosaurus rex (T. rex) resmi diperkenalkan ke publik. Produk ini langsung menarik perhatian karena mengusung konsep "kulit dinosaurus" yang ditumbuhkan di laboratorium.

Dilaporkan oleh Reuters, tas tersebut merupakan hasil kolaborasi antara ilmuwan dan desainer di Amerika Serikat. Proyek ini bertujuan menunjukkan potensi material kulit sintetis berbasis bioteknologi sebagai alternatif di masa depan. Tas berwarna turquoise itu kini dipamerkan di Art

Zoo Museum, Amsterdam, Belanda. Menariknya, tas tersebut ditempatkan di dalam sangkar, tepat di bawah model T. rex, dan akan dipamerkan hingga 11 Mei. Setelah itu, tas ini rencananya dilelang dengan harga pembukaan yang diperkirakan melebihi USD500.000.

Proyek ini merupakan hasil kerja sama antara The Organoid Company, Organoid, dan VML. Sebelumnya, Organoid dan VML juga pernah menciptakan bakso raksasa pada 2023 dengan menggabungkan DNA mammoth berbulu dan sel domba. CEO The Organoid Company, Thomas Mitchell, mengungkapkan bahwa

proses pengembangan "Kulit T. rex" ini menghadapi berbagai tantangan teknis. Di sisi lain, Che Connon dari Lab-Grown Leather Ltd. menyebut bahwa klaim asal-usul T. rex memberikan daya tarik tersendiri bagi produk tersebut.

Meski inovatif, proyek ini memicu perdebatan di kalangan ilmuwan. Banyak yang mempertanyakan validitas klaim penggunaan material dari dinosaurus, mengingat keterbatasan data genetik yang benar-benar dapat diambil dari

fosil berusia jutaan tahun. "Ini bukan hanya alternatif ramah lingkungan pengganti kulit asli, tetapi juga peningkatan teknologi," tambahnya.

Meski terdengar revolusioner, konsep "kulit T. rex" ini menuai skeptisisme dari sejumlah ilmuwan. Mereka menilai bahwa material dari spesies hewan modern tetap diperlukan dalam proses pembuatannya, sehingga klaim sebagai kulit dinosaurus dinilai kurang tepat.

Paleontolog Melanie Doring dari Vrije Universiteit Amsterdam, Belanda, menjelaskan bahwa kolagen dalam tulang dinosaurus hanya ditemukan dalam fragmen yang sangat kecil. Jumlah tersebut, menurutnya, tidak cukup untuk meregenerasi kulit atau bahkan menciptakan material yang benar-benar menyerupai kulit Tyrannosaurus rex.

Pandangan serupa disampaikan oleh Thomas R. Holtz Jr. dari University of Maryland, Amerika Serikat. Ia menegaskan bahwa kolagen yang ditemukan pada fosil T. rex berasal dari bagian tulang, bukan kulit. Bahkan jika proteinnya cocok sekalipun, kolagen tersebut tidak memiliki struktur serat berskala besar yang menjadi ciri khas kulit hewan.

Menanggapi kritik tersebut, CEO The Organoid Company, Thomas Mitchell, menyatakan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal wajar dalam inovasi ilmiah. Ia menekankan bahwa kritik justru menjadi fondasi penting dalam proses penemuan. Mitchell juga mengklaim bahwa proyek ini merupakan pendekatan paling mendekati yang pernah dicapai manusia dalam menciptakan material yang menyerupai T. rex. (*)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) | **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. | **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN | **TRENGGALEK:** TINA W | **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO | **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN | **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN | **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Pilihan Bahan Hijab saat Cuaca Panas: Nyaman dan Tetap Stylish

Cuaca panas yang melanda sejumlah wilayah belakangan ini menjadi tantangan tersendiri, khususnya bagi perempuan berhijab. Aktivitas sehari-hari yang padat ditambah suhu udara yang tinggi kerap menimbulkan rasa gerah dan tidak nyaman.

Oleh karena itu, memilih bahan hijab yang nyaman dipakai saat cuaca panas bukan soal gaya, tapi juga soal kenyamanan dan kesehatan kulit. Di negara beriklim seperti Indonesia, pengguna hijab adem, breathable hijab, lightweight hijab, hijab menyerap keringat, dan hijab anti gerah jadi kunci utama biar tetap fresh seharian.

Bahan hijab terbaik untuk cuaca panas adalah yang memiliki sirkulasi udara baik (breathable), sehingga tidak membuat kepala terasa pengap. Selain itu, bahan yang mampu menyerap kelembapan (moisture-wicking) penting agar keringat terserap dan tetap nyaman dipakai.

Pilih juga bahan yang ringan di kepala supaya tidak terasa berat saat digunakan seharian, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Agar

tidak salah pilih, penting mengetahui bahan yang sesuai dengan kondisi cuaca. Dengan bahan yang tepat, kamu tetap bisa nyaman dan percaya diri meski cuaca panas. Biar nggak bingung, ini dia 5 bahan hijab paling nyaman yang bisa diandalkan saat cuaca panas!

Katun (cotton)

Katun (cotton) adalah bahan hijab paling populer untuk cuaca panas karena sifatnya yang breathable dan menyerap keringat secara alami. Katun mudah ditemukan dan cocok digunakan untuk berbagai aktivitas harian, mulai dari bekerja hingga beraktivitas di luar ruangan.

Voal (voile)

Voal (voile) adalah pilihan terbaik. Voal dikenal sebagai bahan hijab yang ringan, tipis, nyaman dan memiliki

sirkulasi udara yang baik, sehingga ngga buat gerah meskipun dipakai lama. Voal juga banyak digunakan untuk hijab bermotif atau printrd scraff.

Jersey tipis

Untuk kamu yang suka praktis, jersey tipis bisa jadi pilihan. Versi lightweight dari bahan ini tetap terasa nyaman karena fleksibel, tidak mudah kusut, dan cukup breathable untuk aktivitas harian. Selain itu, bahan ini juga nggak mudah bergeser, jadi cocok buat kamu yang aktif seharian.

Rayon

Rayon sering disebut sebagai versi yang lebih flowy dari katun karena teksturnya yang jatuh dan lembut saat dipakai. Bahan ini terasa ringan di kepala dan memiliki kemampuan menyerap kelembapan dengan sangat baik, sehingga membantu mengurangi rasa gerah. Karena sifatnya yang adem dan nyaman, rayon menjadi pilihan yang cocok digunakan dalam kondisi cuaca panas, baik untuk aktivitas sehari-hari maupun saat berada di luar ruangan.

Linen

Linen adalah bahan premium yang terkenal sebagai rajanya kain musim panas. Terbuat dari serat alami, linen punya kemampuan menyerap keringat dan cepat kering, sehingga cocok untuk cuaca panas dan lembap.

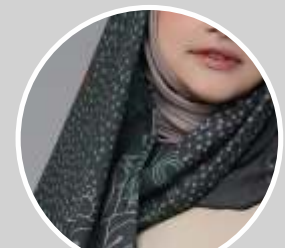
Kunci memilih bahan hijab terbaik saat cuaca panas adalah memastikan bahan ringan, breathable, dan mampu menyerap keringat dengan baik. Dengan bahan yang teppat, kamu bisa tetap tampil stylish tanpa harus merasa gerah atau tidak nyaman. (Nabilla – mahasiswa UINSA, Berkontribusi dalam tulisan ini)

Catat Kekurangan Kain Bahan Hijab

- 1. Katun (Cotton)**
Adem dan nyaman dipakai, tetapi mudah kusut sehingga perlu sering disetrika. Beberapa jenis juga terasa agak kaku dan harganya cenderung lebih mahal karena berbahan alami.
- 2. Voal (Voile)**
Ringan dan favorit untuk hijab, namun bahannya tipis sehingga mudah sobek dan agak menerawang. Perlu perawatan ekstra dan noda pada warna terang sering sulit dibersihkan.
- 3. Linen**
Memberikan kesan elegan, tetapi sangat mudah kusut bahkan setelah disetrika. Bahannya juga terasa lebih berat dan seratnya bisa terurai jika tidak dirawat dengan baik.
- 4. Jersey**
Elastis dan praktis digunakan, namun bisa membentuk lekuk tubuh. Selain itu, bahan ini kurang tahan panas dan beberapa jenisnya terasa licin saat dipakai.
- 5. Rayon**
Ringan dan adem, cocok untuk cuaca panas. Namun, bahan ini mudah kusut, bisa menyusut saat dicuci, dan tidak terlalu elastis dibandingkan bahan lain.



Katun



Voal



Linen



Rayon



Jersey

Reaktivasi BPJS ,...dari hal 1

Upaya pemerintah mereaktivasi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan menuai sorotan tajam dari DPR. Dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu (15/4/2026), terungkap bahwa dari sekitar 11 juta peserta yang sebelumnya dinonaktifkan, baru sekitar 2 juta yang berhasil direaktivasi. Angka ini dinilai jauh dari kesepakatan awal antara DPR dan pemerintah.

Diketahui, pada 1 Februari lalu kegaduhan terjadi saat 11 juta peserta BPJS PBI dinonaktifkan berdasarkan SK Mensos No. 3/HUK/2026 untuk pemutakhiran data. Dampaknya, kartu tidak dapat digunakan untuk layanan kesehatan. Pemerintah kemudian mengumumkan langkah reaktivasi

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, secara terbuka mempertanyakan komitmen pemerintah dalam menjalankan hasil rapat sebelumnya. Ia menegaskan bahwa kesepakatan yang dicapai pada 9 Februari lalu seharusnya menjamin seluruh peserta PBI yang dinonaktifkan tetap mendapatkan layanan kesehatan selama masa transisi tiga bulan.

"Sorry ya sebelum kita lanjut, kenapa saya katakan penegasan ini penting di awal? Supaya frekuensinya sama, semua yang ada di sini. Berarti kesepakatan rapat yang pernah dibuat di Komisi IX maupun di pimpinan DPR tanggal 9 Februari kan tidak dijalankan," ujar Charles.

Ia menambahkan, berdasarkan paparan pemerintah, jumlah peserta yang direaktivasi masih sangat terbatas dibandingkan total keseluruhan. Bahkan, awalnya hanya ratusan ribu peserta dengan kondisi penyakit berat atau katastrofik yang diaktifkan kembali, sebelum akhirnya meningkat menjadi sekitar 2 juta.

"Kan kesepakatan rapatnya adalah 11 juta yang dinonaktifkan tetap mendapatkan layanan selama 3 bulan. Sedangkan kalau dari paparan yang baru saja kita lihat, yang direaktivasi awalnya hanya 100 sekian ribu ya, yang merupakan pasien katastrofik dan lain-lain sekarang menjadi 2 juta sekian," lanjutnya.

Menurut Charles, kondisi tersebut berdampak langsung pada jutaan masyarakat miskin yang belum bisa mengakses layanan kesehatan secara optimal. Ia memperkirakan masih ada sekitar 9 juta peserta yang belum mendapatkan kepastian layanan hingga saat ini.

"Artinya masih ada sekitar 9 juta orang yang tidak bisa mengakses layanan sampai hari ini. Gitu ya, kurang lebih ya," tegasnya.

Beda Klaim Menteri dengan Fakta

Menanggapi hal itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa seluruh peserta yang terdampak tetap dapat memperoleh layanan kesehatan, meskipun status kepesertaannya belum aktif kembali secara administratif. Ia menyebut Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran kepada fasilitas layanan kesehatan.

"Jadi, yang 11 juta ini, kalau mereka datang ke layanan kesehatan akan dilayani. Jadi Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat, untuk 11 juta orang ini, sesuai dengan kesepakatan DPR, kalau mereka sakit, datang ke rumah sakit, itu akan dilayani," jelas Budi.

Ia juga menambahkan bahwa proses reaktivasi tengah difasilitasi oleh Kementerian Sosial dan masyarakat diminta segera melakukan pengaktifan kembali kepesertaan mereka.

"Dan mereka diminta mereaktivasi segera yang prosesnya

sudah difasilitasi oleh Kemensos," ujarnya.

Senada dengan itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan bahwa layanan tetap terbuka bagi seluruh peserta nonaktif, khususnya ketika mereka membutuhkan pelayanan kesehatan.

"Semua layanan. Jadi 11 juta itu kalau sakit, semua layanannya dibuka. Kalau sakit. Kalau sakit lho ya. Kalau nggak sakit kan nggak perlu," ucapnya.

Namun, pernyataan pemerintah tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan temuan di lapangan. Ketua Komisi IX DPR, Felly Estelita Runtuwene, mengungkapkan bahwa masih banyak rumah sakit yang belum menjalankan kesepakatan tersebut. Ia kembali mengingatkan bahwa hasil rapat 9 Februari secara tegas menyebutkan pemerintah akan menanggung iuran PBI selama tiga bulan dan menjamin pelayanan tanpa diskriminasi.

"Senin 9 Februari 2026 kesimpulannya, DPR dan pemerintah

44 Juta Warga Layak, Belum Ditanggung Negara

BADAN Pusat Statistik (BPS) mengungkap adanya kesenjangan besar dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan. Dari total lebih dari 140 juta penduduk yang secara ekonomi masuk kategori layak menerima bantuan, negara saat ini baru mampu menanggung sekitar 96 juta jiwa. Artinya, masih ada sekitar 44 juta warga yang belum tercakup dalam skema pembiayaan tersebut.

Wakil Kepala BPS, Sony Harry Budiutomo, menjelaskan bahwa data tersebut diperoleh setelah pemutakhiran terbaru Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia menyebut kelompok yang berhak menerima bantuan adalah masyarakat dalam desil 1 hingga 5, atau 50 persen terbawah dari sisi kesejahteraan.

"Bapak/Ibu sekalian kita bisa lihat jumlah individu yang eligible atau yang berhak untuk menerima PBI penerima bantuan iuran kalau sesuai aturan itu desil 1 sampai desil 5 itu jumlahnya 140,9 juta. Tetapi kuota penerima PBI sebanyak 96,8 juta individu," ujar Sony dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Rabu (15/4/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut memperlihatkan ketimpangan antara jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan bantuan dengan kapasitas anggaran yang

tersedia. Dengan kata lain, kebutuhan jauh melampaui kuota yang bisa ditanggung negara.

"Artinya lebih banyak orang yang harusnya dicover dibanding kuotanya," tegasnya.

Sony menjelaskan, sistem desil yang digunakan pemerintah menempatkan kelompok desil 1 hingga 5 sebagai prioritas utama penerima bantuan karena berada pada tingkat kesejahteraan paling rendah. Namun, keterbatasan kuota membuat tidak semua masyarakat dalam kelompok ini dapat diakomodasi dalam program PBI.

Meski demikian, ia menambahkan bahwa tidak seluruh individu dalam kelompok tersebut sepenuhnya bergantung pada bantuan negara. Sebagian di antaranya telah memiliki kemampuan untuk membayar iuran secara mandiri atau telah ditanggung melalui skema lain, seperti status pekerjaan.

"Memang walaupun berada di desil 1 sampai 5, sebagian individu itu sudah ada yang membayar iuran secara mandiri, ada juga PNS golongan 1 golongan 2 yang juga sudah dicover dan seterusnya," jelasnya.

Kendati begitu, data BPS tetap menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang secara ekonomi layak menerima bantuan jauh lebih besar dibandingkan dengan kuota

sepatat dalam jangka waktu 3 bulan ke depan, semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Itu kesepakatan kita antara DPR dan pemerintah tanggal 9," kata Felly. (tin,rls,kum,ist/dya)

DERETAN PENYAKIT DENGAN BIAYA TERMAHAL DALAM PROGRAM JKN DI INDONESIA TAHUN 2025

Jantung

■ 29,73 juta kasus
■ Rp 17,35 triliun.

Gagal ginjal

■ 12,69 juta kasus
■ Rp 13,38 triliun.

Stroke

■ 9,53 juta kasus
■ Rp 7,21 triliun.

Kanker

■ 7,19 juta kasus
■ Rp 10,31 triliun.

Thalassaemia

■ 0,40 juta kasus
■ Rp 10,31 triliun.

Sirosis hati

■ 0,31 juta kasus
■ Rp 0,28 triliun.

Hemofilia

■ 0,08 juta kasus
■ Rp 0,91 triliun.

■ Jumlah Kasus (Juta Kasus)
■ Jumlah Biaya (Rp Triliun)

yang tersedia. Hal ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dalam memastikan program jaminan kesehatan dapat menjangkau seluruh kelompok rentan secara tepat sasaran.

Di sisi lain, BPS terus melakukan pemutakhiran DTKS guna meningkatkan akurasi data penerima bantuan. Hingga April 2026, proses pembaruan data telah mencapai 17,51 persen dari total basis data yang ada--meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. (wid ist,ant/dya)

DIJUAL RP 65 MILIAR, KKP SEGEL PULAU UMANG BATEN

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengambil langkah tegas dengan menyegel Pulau Umang yang berada di perairan Kabupaten Pandeglang, Banten. Tindakan ini dilakukan setelah pulau seluas sekitar lima hektare tersebut sempat dipromosikan untuk dijual dengan harga Rp 65 miliar via media sosial.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pung Nugroho Saksono, menyatakan penyegelan merupakan bagian dari proses penelusuran lebih lanjut terkait legalitas pengelolaan pulau tersebut.

“Setelah penyegelan pada Kamis, kami akan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait aspek peraturan



KKP menindak isu penjualan Pulau Umang di Kab Pandeglang dengan menghentikan sementara pemanfaatan ruang laut resor milik PT. GSM selaku pengelola. (Ist)

dan kepemilikan,” ujar Pung dalam konferensi pers di Kementerian KKP, Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Berdasarkan hasil penyelidikan awal, Pulau Umang diketahui dikelola oleh PT GSM dan telah dimanfaatkan sebagai kawasan wisata, termasuk pembangunan resor dan fasilitas wisata bahari.

Namun, pihak pengelola membantah telah menjual pulau tersebut secara online. Bahkan, iklan penjualan yang sempat muncul di situs agen properti disebut telah dihapus sejak 7 April 2026.

Meski demikian, KKP menemukan

sejumlah pelanggaran dalam aspek perizinan. Pengelola pulau disebut belum mengantongi dokumen penting seperti Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil, hingga izin usaha wisata bahari. Atas dasar itu, tidak hanya pulau, fasilitas seperti resor dan glamping di lokasi tersebut juga ikut disegel.

Pung menegaskan bahwa praktik promosi penjualan pulau, apalagi di wilayah yang relatif dekat dengan Jakarta, menjadi perhatian serius pemerintah. Ia menilai pengelolaan pulau kecil

tidak boleh dilakukan tanpa mengikuti ketentuan yang berlaku.

“Negara punya aturan. Pengelolaan pulau kecil tidak bisa dilakukan sembarangan, termasuk dalam pembangunan,” tegasnya.

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP, Sumono Darwinto, menyatakan pemerintah tetap memberi ruang bagi pelaku usaha untuk beroperasi, selama memenuhi kewajiban perizinan yang dipersyaratkan.

“Pihak pelaku sudah kami arahkan untuk mengurus perizinan dasar ke Direktorat Jenderal Teknis Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut-nya, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lautnya, rekomendasi pulau-pulau kecil, dan tentunya objek sesuai kegiatan di wisata bahari tersebut,” papar Sumono.

Menurutnya, langkah penyegelan justru menjadi bagian dari proses penertiban administrasi, agar pengelolaan pulau dan kegiatan wisata bahari memiliki dasar hukum yang jelas. Ia menambahkan, jika aktivitas yang dijalankan adalah wisata bahari, maka izin usaha dari instansi terkait menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. (wid rls,kcm/dya)

BEBERAPA PULAU DI INDONESIA YANG PERNAH DIKLANKAN

- **Kepulauan Widi (Maluku Utara):** Pernah menjadi sorotan dunia karena masuk daftar lelang di situs Sotheby's Concierge Auctions pada akhir 2022 hingga awal 2023.
- **Pulau Umang (Banten):** Baru-baru ini (April 2026) disegel oleh KKP setelah muncul iklan penjualannya di media sosial seharga Rp 65 miliar.
- **Pulau Gili Nanggu (Lombok, NTB):** Memiliki luas sekitar 5 hektare dan sempat ditawarkan seharga Rp 9,9 miliar di situs daring.
- **Pulau Ajab (Bintan, Kepulauan Riau):** Muncul di situs Private Islands Online pada tahun 2018 dengan harga sekitar USD 3,3 juta (Rp 44 miliar).
- **Pulau Gambar (Laut Jawa):** Pernah diklankan di situs asing pada tahun 2012 sebagai pulau pribadi yang cocok untuk kegiatan menyelam dan memancing.
- **Pulau Lantigiang (Selayar, Sulawesi Selatan):** Berada di kawasan Taman Nasional Takabonerate dan sempat dikabarkan akan dijual seharga Rp 900 juta pada 2021.
- **Pulau Panjang (Sumbawa, NTB):** Sempat ditawarkan di situs Private Islands Online sebagai pulau yang belum dikembangkan.



PEMERINTAH Indonesia mengklaim berhasil menambah wilayah kedaulatan seluas 127,3 hektare di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, setelah proses penegasan batas darat dengan Malaysia rampung dilakukan.

Langkah ini disebut sebagai hasil dari diplomasi damai antara kedua negara. Kepala Kantor Staf Presiden, Muhammad Qodari, menyampaikan bahwa kesepakatan terbaru tersebut memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga kedaulatan teritorial di kawasan perbatasan.

“Wilayah seluas 127,3 hektare yang pada batas lama merupakan bagian dari Malaysia, kini sah menjadi wilayah Indonesia,” ucap Qodari di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Wilayah RI Bertambah di Pulau Sebatik

Ia menjelaskan, penyesuaian garis batas tidak hanya berdampak pada penambahan wilayah Indonesia, tetapi juga menyebabkan sebagian kecil wilayah Indonesia masuk ke dalam teritori Malaysia. Namun, luasnya jauh lebih kecil.

“Hanya 4,9 hektare dari wilayah pada batas lama Indonesia yang kini menjadi bagian dari Malaysia,” tuturnya.

Menurut Qodari, penyelesaian batas darat di Pulau Sebatik menjadi bukti keberhasilan pendekatan diplomasi damai yang ditempuh pemerintah. Kesepakatan ini juga dinilai strategis dalam mempertegas batas negara sekaligus meminimalkan potensi konflik di kawasan perbatasan.

Di sisi lain, pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah membentuk tim khusus untuk menghitung kompensasi bagi masyarakat yang terdampak

perubahan batas wilayah tersebut.

“Menghitung ganti rugi tanah dan lahan masyarakat terdampak dari penegasan batas wilayah di Pulau Sebatik,” ujar Qodari.

Sebagai bagian dari penguatan wilayah perbatasan, pemerintah juga menyiapkan anggaran sebesar Rp 86 miliar pada 2026. Dana ini akan digunakan untuk mendukung operasional 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang berada di bawah pengelolaan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).

Sejak 2016 hingga 2024, Indonesia telah membangun dan meresmikan 15 dari total 18 PLBN yang direncanakan di berbagai



wilayah strategis. Sejumlah pos yang telah beroperasi di antaranya berada di Entikong, Motaain, Skouw, Serasan, hingga Sebatik yang kini telah menyelesaikan penegasan batas daratnya. (wid,tmo,rls/dya)